

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

IMPLEMENTATION OF BORDER AREA TOURISM DEVELOPMENT POLICY IN BENGKAYANG REGENCY

S. Y. Pudjianto¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Tanjungpura
Surel : s.y.pudjianto@fisip.untan.ac.id

Abstract

This research is based on the condition that the objectives of implementing tourism policy in Bengkayang Regency have not been achieved effectively. This can be seen, among other things, that the condition of basic infrastructure, especially roads, is still very limited, which makes the accessibility of tourist areas difficult and hampers connectivity and inclusive development. The research method uses descriptive qualitative research methods, the data used in this research is primary and secondary data obtained from all parties involved in implementing tourism policy in the Jagoi Babang tourist area. The research results show that the implementation of tourism policy in the Jagoi Babang tourist area is not yet effective due to factors: standards and policy targets that are not yet understood, lack of available resources, unsupportive organizational character, communication between organizations that has not led to synergistic collaboration between organizations. , there is a tendency for policy implementers to refuse, and socio- economic and political environmental factors that influence the course of implementation, and the work structure of the tourism development strategy has not been implemented effectively. An effective policy strategy in developing tourism in the Jagoi Babang tourist area, Bengkayang Regency is to use a collaborative strategy governance.

Keywords: Strategy, Policy Implementation, collaborative governance

Abstrak

Penelitian ini didasarkan atas adanya kondisi belum tercapainya tujuan implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bengkayang secara efektif, hal ini terlihat antara lain, kondisi infrastruktur dasar terutama jalan masih sangat terbatas yang menyebabkan aksesibilitas wilayah wisata dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan secara inklusif. Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini data primer maupun sekunder yang diperoleh dari semua pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan pariwisata di kawasan wisata Jagoi Babang. Hasil penelitian belum efektifnya implementasi kebijakan pariwisata di kawasan wisata Jagoi Babang disebabkan oleh faktor-faktor: standar dan sasaran kebijakan yang belum dipahami, kurangnya sumber daya yang tersedia, karakter organisasi yang kurang mendukung, komunikasi antar organisasi yang belum menimbulkan adanya kerjasama yang sinergis antar organisasi, adanya kecenderungan pelaksana kebijakan yang menolak, dan faktor lingkungan sosial ekonomi dan politik yang mempengaruhi jalannya implementasi, dan struktur kerja strategi pengembangan pariwisata belum terlaksana secara efektif, Strategi kebijakan yang efektif dalam pengembangan pariwisata di kawasan wisata Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang adalah dengan menggunakan strategi *collaborative governance*.

Kata Kunci: Strategi, Implementasi Kebijakan, , *collaborative governance*

Diajukan : 06 Januari 2025 Direvisi : 07 Januari 2025 Diterima : 05 Februari 2025

Pendahuluan

Sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional. Disamping dapat meningkatkan pendapatan nasional, sektor ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama masyarakat daerah. Peran pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi nasional memiliki posisi yang strategis. Pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan perolehan devisa negara, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan yang dapat memberikan dampak positif bagi penciptaan dan peningkatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha, peningkatan penerimaan pajak dan pendapatan daerah maupun nasional.

Kompleksitas kebijakan pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar baik pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensi wisatanya. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata merupakan industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sangatlah beralasan jika di era otonomi daerah, berbagai daerah berusaha menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di daerah masing-masing melalui kebijakan pemerintah daerah setempat. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, arah pembangunan kepariwisataan nasional dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.

Wilayah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom dan bersifat daerah administrasi, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah, urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah dan Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan masalah pengembangan pariwisata, bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan, tentunya lebih

memahami potensi daerahnya, sehingga akan lebih tepat dalam menentukan obyek wisata yang perlu dikembangkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati. Bengkayang Nomor 79 tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yang banyak memiliki sektor pariwisata potensial untuk dikembangkan, sehingga pariwisata dapat diharapkan sebagai sektor unggulan yang menghasilkan pendapatan daerah. Saat ini di Kabupaten Bengkayang terdapat beberapa obyek wisata yang telah menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun manca negara. Obyek wisata yang ada dibagi dalam kawasan wisata bahari/ maritim, kawasan wisata agro, kawasan wisata alam.

Namun pada kenyataannya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang saat ini terkendala masih kurangnya perhatian dari para pemangku kepentingan terhadap pengembangan kawasan objek wisata baik dari pemerintah daerah, masyarakat ataupun pihak ketiga/ pengusaha. Sehingga pengelolaan kawasan belum dapat dikembangkan secara maksimal. sehingga kontribusi sektor pariwisata dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat cenderung belum dapat merasakan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa permasalahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang dapat diidentifikasi antara lain, kondisi infrastruktur dasar terutama jalan masih sangat terbatas yang menyebabkan aksesibilitas ke sebagian wilayah dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan secara inklusif. Hingga saat ini akses pariwisata yang tersedia khususnya di kawasan wisata Jagoi Babang hanya melalui jalan darat dengan kondisi jalan yang ada belum memadai secara keseluruhan, sedangkan akses transportasi lainnya seperti bandara dan pelabuhan/ dermaga kapal laut belum tersedia.

Belum optimalnya pengembangan destinasi kawasan di Kabupaten Bengkayang, juga terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan wisata, seperti tempat penginapan untuk wisatawan, sarana informasi, perbankan, fasilitas umum yang masih terbatas (lokasi parkir tempat ibadah terkesan apa adanya), sehingga di hari-hari libur atau hari-hari besar lokasi parkir masih belum tertata dengan baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fasilitas di hampir seluruh objek wisata di kawasan wisata Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang masih sangat minim. Pengembangan kegiatan pariwisata masih berfokus pada pengembangan aspek destinasi alam, dan belum terlihat upaya menciptakan objek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Sambas, semisal upacara dan tari adat atau ekonomi kreatif lainnya.

Dalam pengembangan pariwisata diperlukan peran serta dan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang lebih maksimal. Hal ini disebabkan karena persaingan dunia pariwisata sudah semakin ketat, oleh sebab itu diperlukan strategi implementasi kebijakan yang tepat yang dapat mendorong kemampuan dan kesanggupan untuk bersaing dengan daerah tujuan wisata lain baik lokal, regional, nasional, maupun global. berdasarkan pengamatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang belum beralas secara optimal, sehingga belum mampu meningkatkan ketertarikan wisatawan. Banyak faktor yang mengakibatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang khususnya destinasi wisata Jagoi Babang belum dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan Peraturan Bupati. Bengkayang Nomor 79 tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata belum di dukungan dengan sumber daya di dalam pelaksanaan teknis operasional kerja, hal ini diindikasikan dengan masih kurang maksimalnya pedoman pola kerja yang diterapkan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Sehingga koordinasi kelembagaan di daerah belum dapat berjalan dengan baik, adanya kesenjangan aparatur dan kewenangan masih menjadi masalah utama sehingga organisasi pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata menjadi terhambat untuk dapat menyesuaikan dengan pengembangan pariwisata yang ada baik lokal maupun nasional. Dengan adanya berbagai masalah tersebut maka peranan pemerintah sebagai fasilitator sangatlah strategis dalam mewujudkan upaya-upaya ke arah pengembangan pariwisata tersebut, melalui empat hal utama yaitu; perencanaan kawasan pariwisata, pembangunan fasilitas utama dan pendukung pariwisata, pembuatan kebijakan pariwisata, serta pembuatan peraturan-peraturan.

Berdasarkan pada latar belakang masalah penelitian yang terkait dengan strategi implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bengkayang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bengkayang belum efektif ?; 2) Strategi kebijakan apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bengkayang dapat lebih efektif ?

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini *pertama*, untuk mendeskriptifkan

secara lengkap dan mengetahui, menjelaskan serta mengungkap fakta empirik berkenaan dengan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang dan *kedua*, mendiskripsikan faktor-faktor yang menghambat efektivitas dalam implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bengkayang, serta Strategi kebijakan apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bengkayang dapat lebih efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pariwisata kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkayang, Faktor-faktor apa yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata belum efektif; serta strategi kebijakan apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Bengkayang dapat lebih efektif. Dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menginvestigasi dan memahami implementasi kebijakan di seting sosial yang alami.

Subyek penelitian yang selanjutnya dijadikan informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yaitu para pihak yang terkait dengan kebijakan pariwisata di Kabupaten Bengkayang yang dianggap paham dan mempunyai informasi dan dapat memberikan informasi tentang topik penelitian.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Oleh sebab itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan selanjutnya data yang telah terkumpul baik data primer dan sekunder digunakan analisis dengan pendekatan deskripsi dan kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data, display data dan verifikasi.

Hasil dan Diskusi

1. Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pariwisata

Dalam mengkaji faktor apa yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata belum efektif, peneliti merujuk pada pemikiran van Meter and van Horn (1975:461-478), yakni variable-variabel: *Policy standards and objectives; Policy resources; Interorganizational communication and enforcement activities; The Characteristics of the implementing agency; The disposition of Implementors; Economic social, and political conditions.*

Policy standards and objectives, Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan, dan indikator kinerja merupakan hal yang penting dalam kebijakan publik, indikator kinerja menilai apakah standar dan sasaran/tujuan telah direalisasikan. Implementasi kebijakan bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari perlunya standar dan tujuan kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa arah dari kebijakan kepariwisataan di Temajuk belum mencerminkan sasaran dan target infra struktur fisik non fisik, sehingga keinginan dan harapan eksternal belum terpenuhi, akibatnya daya dukung masyarakat maupun para pelaku usaha kepariwisataan dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Bengkayang cenderung tidak berkembang/ stagnan. Padahal pengembangan pariwisata yang mengacu pada kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bengkayang menuntut dilakukan secara partisipatif melalui masukan dan

tanggapan kelompok kepentingan yang terkait dengan pengembangan pariwisata dalam bentuk rekomendasi program yang mampu mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang secara partisipatif. Demikian pula halnya dengan pengembangan promosi dan destinasi wisata, belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dipahami bahwa berdasarkan penelusuran dokumen dan informasi yang diperoleh, prioritas pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang belum dibuatnya kebijakan turunan (Perbub) sebagai kebijakan yang bersifat operasional dari Perda yang telah ditetapkan.

Policy resources, Selain standar dan tujuan kebijakan yang harus dipahami oleh para pelaksana kebijakan dalam proses implementasi, juga aspek sumber-sumber yang tersedia, karena sumber-sumber juga akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut akan mencakup dana atau perangsang lain yang dapat mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan menjadi lebih efektif. Ketersediaan sumber daya dalam suatu organisasi juga merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan berpengaruh besar terhadap pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber kebijakan mempunyai makna yang cukup luas, sumber-sumber yang tersedia atau terlibat dalam implementasi kebijakan selain dukungan pendanaan implementasi kebijakan juga mencakup orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai dari segi jumlah dan kemampuan, sarana dan prasarana termasuk akses terhadap informasi yang jelas dan cepat. Kesemua aspek sumber-sumber kebijakan tersebut tentunya juga mempunyai kontribusi masing-masing pada implementasi kebijakan pariwisata.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dapat dianalisis, bahwa kapabilitas aparatur Disparpora Kabupaten Bengkayang, sebagai implementor kebijakan pengembangan pariwisata masih belum optimal. Bukan saja karena aspek kualifikasi pendidikannya, meskipun secara praktis sudah memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai program pengembangan yang telah ditetapkan, namun integritas pelaksana kegiatan harus terus disempurnakan. Tentu banyak hal yang bisa mempengaruhi integritas pelaksana kegiatan, sebagai individu perlu penguatan individu seperti *training and spesific skill*, penyediaan personil profesional, merekrut dan mempertahankan staf yang kompeten, dan memperhatikan struktur kompensasi yang efektif. Dalam menyikapi permasalahan sumber daya manusia, berdasarkan dokumen yang ada menunjukkan bahwa Disparpora Kabupaten Bengkayang telah melakukan pemetaan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai yang diarahkan agar dapat menunjang pemahaman dan kompetensi kepariwisataan, untuk meningkatkan kapabilitas pegawai. Namun demikian, karena permasalahan anggaran, pemetaan diklat pegawai pun masih belum dapat secara maksimal dilakukan. Dukungan anggaran yang terutama termuat pada dokumen APBD menjadi demikian penting karena keterlaksanaan seluruh program akselerasi pengembangan pariwisata bertumpu

pada ketersediaan anggaran untuk membiayai berbagai program dan proyek pengembangan.

Interorganizational communication and enforcement activities, Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dicapai apabila yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para pelaksana yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

Disparpora Kabupaten Bengkayang yang seharusnya berperan sebagai perancang dan pelaksana kebijakan, memang kurang memiliki peran dominan dalam perencanaan pengembangan pariwisata, yakni pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan. Meski demikian, dalam berbagai kesempatan, seluruh perangkat dinas khususnya Disparpora Kabupaten Bengkayang senantiasa mensosialisasikan program akselerasi pengembangan pariwisata.

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan, sangat diperlukan adanya keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat, secara serasi, selaras, dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah Kabupaten Bengkayang agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Bagaimana pun baiknya sebuah kebijakan, tanpa dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait dengan kepariwisataan, tidak dapat terimplementasi secara maksimal. Dukungan dan partisipasi dari masyarakat tersebut dapat diupayakan oleh *leading sektor* terkait melalui intensitas komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terencana dan terarah. Komunikasi dan sosialisasi dilakukan sejak awal proses perencanaan, untuk menyerap berbagai alternatif program pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan para implementor. Dengan demikian apa pun program yang direncanakan sebagai devariat dari kebijakan pengembangan pariwisata, dapat direalisasikan, melalui dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dikatakan bahwa persoalan yang muncul adalah terkait dengan komitmen dan konsistensi Disparpora/ Kadis dalam memberdayakan *stakeholders* kepariwisataan sebagai *target groups* melalui inisiasi berbagai program unggulan yang dirancang sebagai satu kesatuan utuh

pada rancangan perencanaan sehingga kebijakan pengembangan pariwisata akan menjadi populis bagi *stakeholders* kepariwisataan. Indikasi terhadap kekuatan komitmen ini nampaknya belum sesuai dengan harapan ditetapkan kebijakan pengembangan pariwisata Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkayang.

The Characteristics of the implementing agency, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang kesemuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan destinasi wisata kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkayang, informan mengungkapkan bahwa sampai sekarang tidak ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata perbatasan, belum terdapat regulasi yang jelas bagaimana kawasan perbatasan tersebut dikelola, dan tidak terdapat satu Dinas pun yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pembentukan badan yang khusus mengelola kawasan wisata perbatasan di Kabupaten Bengkayang telah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk pengembangan sektor pariwisata, karena keberadaan badan pengelola akan menjadi komponen penguat jejaring industri pariwisata dan masyarakat pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang.

Pelaksanaan promosi wisata daerah yang belum digarap secara optimal, dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang berkunjung ke kawasan wisata perbatasan yang masih rendah. Unsur promosi pariwisata diharapkan menjadi alat utama untuk melakukan destinasi ke kawasan wisata perbatasan Kabupaten Bengkayang. Selain itu berdasarkan observasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki *mind set* pariwisata seperti yang diharapkan, sehingga hal tersebut mempengaruhi efektivitas peran dari pemerintah daerah sebagai motivator dan dinamisator dalam pengembangan pariwisata.

The disposition of Implementors, Kecenderungan atau sikap dari para pelaksana dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Berhasil atau gagal implementasi kebijakan publik salah satu faktor penyebabnya adalah bagaimana kecenderungan para pelaksana dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Kecenderungan para pelaksana kebijakan juga merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting dalam implementasi kebijakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika para pelaksana kebijakan besikap baik terhadap suatu kebijakan berarti adanya dukungan terhadap kebijakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Dan demikian sebaliknya

bila para pelaksana kebijakan yang ada bersikap berbeda dengan pembuat kebijakan maka akan mempengaruhi proses kebijakan untuk mencapai tujuan.

Disparpora sebagai implementor kebijakan amat memahami bahwa terdapat berbagai kelompok yang berkepentingan dengan kebijakan pengembangan pariwisata, yang dengan sendirinya akan membantu Dinas dalam mengembangkan sektor kepariwisataan, sehingga kerjasama yang baik melalui pelibatan secara aktif kelompok-kelompok kepentingan tersebut dalam berbagai program kerja yang sudah dirumuskan, akan memudahkan pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian tujuan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang, dibawah koordinasi Disparpora Kabupaten Bengkayang.

Manfaat dari kebijakan pengembangan pariwisata ini jelas tidak hanya secara kuantitatif terkait dengan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor kepariwisataan, tetapi juga mengungkit prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu partisipasi dan penguatan masyarakat pariwisata seperti peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kelembagaan kepariwisataan, serta tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat terutama dengan mengedepankan *hospitality* dalam konteks sadar wisata, sesuai dengan program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan). Dari uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kondisi tersebut menunjukkan komitmen dan pemahaman dari sebagian masyarakat pariwisata maupun pelaku usaha kepariwisataan yang belum maksimal, sehingga persoalan pariwisata senantiasa menawarkan berbagai masalah yang semakin kurang baik, dan semakin sulit untuk diselesaikan. Terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul tentang sikap yang belum sadar wisata, pemerintah daerah melalui dinas terkait, memperhatikan karakteristik objek dan daya tarik wisata, dan tradisi masyarakat, serta tuntutan pasar wisata yang dihadapi, maka pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang senantiasa tetap memperhatikan beberapa prinsip yakni; Prinsip keberlanjutan dari pariwisata itu sendiri, Prinsip partisipasi masyarakat, Prinsip terhadap daya dukung lingkungan pariwisata agar pengembangan pariwisata tetap dapat dijaga kelestariannya.

Economic social, and political conditions, Kondisi ekonomi sosial dan politik yang ada pada lingkungan implementasi kebijakan dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kebijakan. Beberapa kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kebijakan diantaranya sumber-sumber ekonomi yang dapat mendukung implementasi kebijakan, kondisi ekonomi sosial masyarakat, sifat pendapat umum tentang pentingnya

isu kebijakan, dukungan elit, dan dukungan kelompok kepentingan lainnya. Untuk menilai kinerja implementasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah sejauhmana lingkungan eksternal tersebut turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Jika lingkungan ekonomi sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Pengembangan pariwisata di wilayah wisata perbatasan Kabupaten Bengkayang merupakan urusan bersama pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait, namun kepentingan keterlaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata adalah menjadi kewenangan Disparpora sebagai penanggungjawab. Hal ini menggambarkan juga bahwa otoritas kekuasaan politik dan inovasi Disparpora sebagai *leading sector* pengembangan kepariwisataan. Acuan arah dan tujuan pengembangan masih bersifat *top down* sebagai manifestasi politik sentralisasi pada skala pemerintah daerah. Demikian juga Disparpora sebagai pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata membutuhkan kewenangan yang kuat dalam mendapatkan proteksi dari kepentingan politik yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan pariwisata. Dengan adanya kewenangan Disparpora tersebut menimbulkan masalah aksesibilitas pihak-pihak yang berkepentingan terdapat pengembangan kepariwisataan di wilayah perbatasan terhadap sumber pendanaan yang akan membantu mereka dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang menunjang penguatan kelembagaan, dan tidak terakomodir dengan jelas. Padahal program penguatan kelembagaan pun merupakan salah satu program akselerasi yang senantiasa disosialisasikan oleh Disparpora Kabupaten Bengkayang. Sebagai contoh untuk memudahkan wisatawan menuju tempat wisata Riam Merasap, desa Sebujiit diperlukan adanya jalan darat, sementara akses jalan menuju ke lokasi wisata tersebut masih belum bagus. Kebijakan pengembangan pariwisata dikawasan perbatasan yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilaksanakan oleh Disparpora, serta dukungan instansi teknis lain terkait dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan tentu didukung oleh besaran anggaran dari APBD yang secara normatif adalah produk bersama pemerintah daerah bersama DPRD dalam bentuk peraturan daerah.

Berdasarkan informasi dan hasil wawancara maka dapat dikatakan bahwa pada tahapan penyusunan APBD terjadinya tarik menarik kepentingan antara pemerintah dengan DPRD yang memiliki basis konstituen yang berbeda daerah pemilihan maupun kepentingan pengembangan pariwisata. Demikian juga tarik menarik kepentingan terjadi pada kegiatan pengembangan pariwisata yang akan dipilih dalam menjabarkan kebijakan pembangunan kepariwisataan. Dari hasil wawancara dapat dianalisis, karena anggota legislatif juga memiliki hak budget maka pendekatan politis dalam menentukan sasaran tidak bisa diabaikan. Faktanya DPRD

memiliki konstituen yang harus diperjuangkan aspirasinya sehingga kadang tidak lagi berfokus pada orientasi obyektif kepada tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata, hal ini bercampur dengan kepentingan kepala daerah, yang juga pejabat politis. Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang belum efektif, yakni: 1) Sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan, belum dibuat kebijakan operasional secara jelas dapat diukur; 2) Sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan dalam mendukung pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata sangat terbatas; 3) Koordinasi lintas dinas dan lintas *stakeholders* yang dilakukan Disparpora belum terlaksana secara efektif; 4) Komunikasi antar organisasi, SOP (*Standar Operasional Prosedur*), dan struktur kerja belum terlaksana secara efektif; 5) Sikap para pelaksana maupun masyarakat berkaitan pengembangan pariwisata belum optimal; 6) Belum adanya daya dukung lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan tidak terdapat kejelasan dan kepastian normatif menyangkut institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata Temajuk.

2. Strategi Kebijakan Pariwisata

Setelah diketahuinya faktor-faktor penyebab belum efektifnya implementasi kebijakan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Maka langkah selanjutnya menentukan strategi apa yang harus dilakukan agar tujuan kebijakan pengembangan pariwisata dapat berjalan efektif.

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Kalimantan Barat, dan termasuk ke dalam salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN), dan kawasan wisata perbatasan ini merupakan kawasan yang potensial untuk dikembangkan kepariwisataannya. Sebelum menentukan strategi yang efektif dalam implementasi kebijakan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang, maka langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melakukan analisis SWOT dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal strategi implementasi kebijakan pariwisata melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, terkait dengan implementasi kebijakan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas pemerintah daerah untuk mempengaruhinya.

Seperti juga pada analisis lingkungan internal, maka analisis lingkungan eksternal juga terdiri atas dua faktor yaitu, faktor peluang dan faktor ancaman. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada diluar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya, atau paling tidak

kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman adalah lebih terbatas dan perlu dihadapi secara terfokus dan bertahap.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan tersebut, maka strategi kebijakan yang efektif dalam pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang adalah dengan menggunakan strategi *Collaborative Governance* menurut Wanna (2008:87). Kebutuhan untuk melakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat pada saat ini masih cenderung pada hubungan yang bersifat adaptif untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Meskipun diantara ketiganya terdapat kesamaan kebutuhan untuk meningkatkan eksistensi lembaganya, namun kerjasama yang terbangun belum menunjukkan adanya kesetaraan diantara, dominasi pemerintah masih terlihat sehingga diperlukan adanya kerjasama yang proporsional diantara ketiga sektor: pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Berdasarkan pada pandangan tersebut, maka strategi dalam mengembangkan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang:

1. Membangun Visi Bersama (*Shared vision*);

Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun finansial, pemerintah Kabupaten Bengkayang tidak dapat mengandalkan kinerja pengembangan pariwisata dengan mengandalkan sepenuhnya kepada sumber daya yang ada. Pemerintah daerah membutuhkan kekuatan yang dimiliki pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk ketrampilan pengelolaan tempat wisata, dan melakukan berbagai program akselerasi pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang. Dengan adanya visi dan peraturan pelaksanaan yang dibuat bersama oleh para pemangku kepentingan dengan jelas, maka akan menimbulkan rasa tanggung jawab bersama dalam pengembangan kawasan pariwisata di Jagoi Babang. Demikian juga dengan adanya visi yang dipahami oleh para pelaku kebijakan akan meminimalisir berbagai kepentingan yang berbeda dan kemudian para pelaku kebijakan akan fokus pada kepentingan bersama yaitu pengembangan kawasan wisata Jagoi Babang.

2. Partisipasi (*Participative*)

Demikian juga dalam implementasi kebijakan pariwisata di Jagoi Babang sangat diperlukan adanya partisipasi baik pihak swasta maupun masyarakat. Para pelaku usaha pariwisata sangat diperlukan untuk dapat berinvestasi dan melakukan pembangunan ditempat wisata. Karena merekalah yang mempunyai sumberdaya baik berupa dana dan pengetahuan serta SDM di bidang kepariwisataan. Sedangkan masyarakat terutama masyarakat yang berdomisili di kawasan pariwisata dan para wisatawan juga tidak kalah pentingnya untuk diajak berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertipan, keindahan dan kelestarian lingkungan, keramahan, kebersihan, sejuk (sapta pesona) agar kawasan wisata Temajuk tetap terjaga keberlanjutannya. Dalam mendorong agar partisipasi terutama masyarakat, maka perlu adanya pemahaman bersama akan

pentingnya pariwisata dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pemahaman masyarakat akan pentingnya tempat pariwisata dan tempat memperoleh penghasilan, maka partisipasi masyarakat akan tumbuh dengan baik.

3. Jejaring (*Network*)

Dalam pengembangan pariwisata di kawasan wisata Jagoi Babang pemerintah dalam hal ini Disparpora perlu membentuk badan otonom yang khusus menangani pengembangan pariwisata. Karena pemerintah dengan segala tugas pemerintahan yang cukup kompleks tidak dapat fokus untuk mengembangkan lokasi wisata, selain minimnya tenaga profesional di bidang kepariwisataan, Disparpora sesuai dengan tupoksinya juga mengurus tentang masalah pemuda dan olah raga. Dengan di bentuknya badan otonom yang menangani kawasan wisata Jagoi Babang, maka komunikasi/ koordinasi antara pelaku usaha pariwisata/ masyarakat dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu badan otonom dapat membangun jejaring dengan berbagai lembaga-lembaga lain dalam pengembangan lokasi wisata Jagoi Babang, juga dengan adanya badan otonom yang khusus menangani kawasan wisata dapat menjadi pusat informasi baik untuk pemasaran maupun kunjungan para wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan wisata Jagoi Babang. Selanjutnya diharapkan dapat tumbuhnya agen-agen perjalanan wisata di Jagoi Babang, yang pada akhirnya terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

4. Kemitraan (*Partnership*)

Konsep *collaborative governance* mempunyai cakupan lebih luas dibandingkan dengan kemitraan. Skala tertinggi dari *collaborative governance* adalah memiliki kesamaan pandangan dengan prinsip kemitraan. Oleh karena itu, secara konseptual dapat diasumsikan bahwa kemitraan merupakan capaian tertinggi dari tahapan *collaborative governance*. Model *collaborative governance* merupakan suatu proses yang diakhiri dengan terwujudnya kemitraan diantara para *stakeholder* sehingga kemitraan merupakan hasil final dari proses *collaborative governance*. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan agar dapat mencapai tujuan dalam hal ini pengembangan pariwisata di kawasan wisata Temajuk, maka pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang harus dapat membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan adanya kemitraan yang baik, pemerintah daerah dapat mengembangkan setra industri lainnya seperti industri kerajinan rakyat maupun menciptakan event kebudayaan yang bertaraf nasional maupun internasional. Hubungan kemitraan ini akan menguntungkan semua pihak. Pemerintah mempunyai tujuan menyejahterakan masyarakat melalui sektor pariwisata dengan mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang ada di daerahnya, sedangkan para pelaku usaha dapat menginvestasikan modalnya untuk memperoleh keuntungan dan masyarakat dapat berusaha dan bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jaringan kemitraan/ kolaborasi tiga elemen

(pemerintah, privat dan masyarakat) jika dapat berjalan di kawasan wisata Jagoi Babang maka dapat di kembangkan atau dilakukan di kawasan-kawasan wisata lainnya.

Dengan adanya kemitraan yang telah terbangun dari tiga elemen tersebut pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan negara lain misalnya negara tetangga Malaysia untuk mengembangkan budaya melayu, kenyataan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya masih saudara serumpun. Konsep kemitraan dari hasil adanya kolaborasi tiga elemen (pemerintah, privat dan masyarakat) mempunyai dampak yang sangat luas, karena dalam kehidupan saat ini pemerintah tidak dapat berperan sendirian atau lebih dominan, namun harus dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah tidak mempunyai kekuatan, khususnya menyiapkan anggaran dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, oleh sebab itu kolaborasi merupakan jalan keluar untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat dirumuskan simpulan penelitian sebagai berikut. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang belum efektif adalah: 1. Sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang, belum dibuat kebijakan operasionalnya secara jelas dapat diukur; 2) Sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun anggaran untuk mendukung pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata masih terbatas; 3) Koordinasi antar pelaksana dan pelaku pariwisata belum terlaksana secara efektif; 4) Komunikasi antar organisasi, struktur kerja belum terbentuk secara jelas yang dapat dilaksana secara efektif; 5) Sikap para pelaksana dan masyarakat berkaitan pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata belum optimal; 6) Daya dukung lingkungan sosial, ekonomi dan politik belum optimal; 7) Tidak terdapat kejelasan dan kepastian normatif menyangkut institusi atau badan/ lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata Jagoi Babang.

Belum efektifnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkayang, maka kiranya dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a) Perlunya penyusunan kembali rencana strategis kepariwisataan sebagai pedoman dan arah pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang, sehingga sasaran dan target kebijakan akan semakin jelas dan terukur.
- b) Diperlukan peningkatan kualitas dan intensitas pendidikan dan pelatihan profesi kepariwisataan bagi aparatur pariwisata, dengan kurikulum yang memuat standar kompetensi yang terukur.

- c) Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan pengembangan pariwisata, sehingga perencanaan pengembangan yang terjadi merupakan dokumen perencanaan bersama antara pemerintah, sektor swasta dengan masyarakat.
- d) Diperlukan pemimpin yang visioner, penuh inisiatif dan inovasi, dan berkomitmen tinggi serta berani mengambil resiko dalam memimpin pengembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang.
- e) Sebagai lembaga politik dalam hal ini DPRD hendaknya membangun kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman mendalam tentang konteks dan konten pembangunan sektor pariwisata, sehingga dapat terbangun *mindset* kepariwisataan yang sama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- f) Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan badan atau lembaga otonom yang memiliki kewenangan mutlak dalam pengelolaan kawasan wisata perbatasan khususnya wilayah Jagoi Babang.
- g) Diperlukan pengembangan kebijakan pariwisata dengan menggunakan perspektif "*collaborative governance*", sehingga berbagai potensi pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan berbagai kekuatan yang ada untuk meningkatkan peluang menghadapi persaingan pariwisata.

Referensi

- Ansell, C. dan Gash, A. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory.*
- Agranoff, R, dan McGuire, M. 2003. *Collaborative Public Management, Washington DC: GU Press.*
- Alfred, D. Chandler, Jr. 2012. *Strategy and Structure: Chapters in The History of The industrial Enterprise.* Cambridge Mass: MIT Press
- Aime Heene,dkk, 2010, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, Jakarta, Arifa Aditama.
- Bryson, John. 2001. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ciamarra, Ugo Pica. 2009. *Basic in Policy Analyssi: How Governments Should Design and Impelemnt Policies.* Washington: Easypol. FAO.
- Creswell, John W., 2010, *Research Design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed,* Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Dye, Thomasd R. 2000. *Understanding Public Policy.* New York: Perentice Hall.
- David Rees & Richard McBain, 2007, *People Management Teori & Strategi (Tantangan & Peluang)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Haris, S. (2007). *Desentralisasi dan otonomi daerah.* Jakarta: LIPI Press.
- Hill, Michael, dan Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy.* London: Sage Publication.
- Islamy. M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kumorotomo, W. (2008). *Desentralisasi fiskal: Politik dan perubahan kebijakan 1974-2004*. Jakarta: Prenada Media.
- Mazmanian, Daniel A. Sabatier, Paul A. 1983. *Implementation and Publik Policy*. USA: Scott, Foresman and Company.
- Mc.Nabb, David E. 2002. *Research Method in Public Administration and Nonprofit Management: Quantitative and Qualitative Approach*. M.E. Sharpe, Armonk, New York.
- Mile, Matthew. B. dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. SecondEdition. London.
- Moleong, L.J.. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke 6), Bandung: RemajaRosdakarya.
- Neuman, W. Lawrence,2013. *Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Indeks.
- Nugroho, Riant , 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rormalademi, Okke. 2018, *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, CV. Budi Utama.
- Siagian, Sondang P. 1992. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Haji Masagung.
- Stoker, G. (1991). *The politics of local Surie, H. G. Ilmu administrasi negara* (Terjemahan Samekto). Jakarta: Gramedia.
- Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, Yogyakarta,Kanisius.
- Tachjan. H, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI.
- Van Meter, Donalds S and Carl E Van Horn. 1975. “*The Policy Implementation Proses: A Conceptual Framework*” Department of political science, Ohio State University, Administration & Society. Vol. 6 No.4 February 1975.
- Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara.
- Wanna, John. 2008. “*Collaborative government: meanings, dimensions, drivers and outcomes*”, Janine O’Flynn and John Wanna. *Collaboratif Governance, A new era of public policy in Australia*. Canberra: ANU E-Press.
- Wayne Parsons, 2011, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Jakarta, Kencana Persada Media Group.
- Wheelen, Thomas L dan Hungger, J. Davis. 2012. *Strategic Management and Bussiness Policy*. Singapore: Addison Wessley.
- Wibawa, Samodra,1994, *Kebijakan Publik Proses Dan Analisis*, Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi, 1989, *Teori Kebijaksanaan Publik*, Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM.
- Keban, Yeremias T, 2008, *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*, Yogyakarta, Gayamedia.

Dokumen-Dokumen dan Peraturan-Peraturan

- Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang *Kepariwisataaan* (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah*



Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol.29. No. 2, bulan Desember, tahun 2024
P-ISSN: 2442-3424; E-ISSN: 2775-7501
<https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi/index>

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bengkayang*